



News Title : Transaksi Domestik Bisa Terpantik	
Media Name : Bisnis Indonesia	Journalist : Rinaldi M. Azka
Publish Date : 18 October 2022	Tonality : Positive
News Page : 14	News Value : 468,750,000
Resources : Oscar Darmawan (CEO Indodax), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi), Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti), Pang Xue Ka (CEO Tokocrypto), Dimas Utomo (General Counsel Pintu)	Ads Value : 156,250,000
Section/Rubrication : Korporasi	Topic : kripto

| PEMBENTUKAN KLIRING KRIPTO |

TRANSAKSI DOMESTIK BISA TERPANTIK

Bisnis, JAKARTA — Para pedagang melihat rencana pemerintah membentuk tiga lembaga pendukung perdagangan kripto akan memantik investor untuk bertransaksi lebih banyak di dalam negeri, membalik keadaan yang saat ini lesu.

Rinaldi M. Azka
rinaldi.azka@bisnis.com

MEROSOT SETELAH MENDAKI

Transaksi kripto di Indonesia pada Januari-Agustus merosot 56,35% secara tahunan dengan realisasi hanya Rp249,3 triliun, menurut data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kemerosotan itu terjadi di tengah peningkatan jumlah investor aset digital itu di Tanah Air.

Investor Aset Kripto di Indonesia

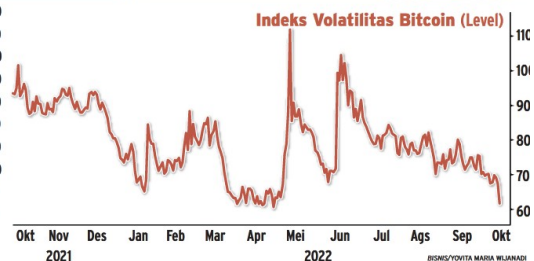
2020: 4 juta
2021: 11,2 juta
Januari-Agustus 2022: 16,1 juta

Nilai Transaksi Kripto di Indonesia

2020: Rp64,9 triliun
2021: Rp859,4 triliun
Januari-Agustus 2022: Rp249,3 triliun



Pergerakan Harga Bitcoin (US\$ Per Dolar)



Indeks Volatilitas Bitcoin (Level)

Sejumlah perusahaan bursa kripto mengatakan pembentukan transaksi dengan lembaga kliring, dan kustodian oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan membuat transaksi lebih transparan sehingga investor merasa aman.

"Pemerintah pun dapat mengawasi transaksi jual-beli dengan lebih transparan dan pasti," kata Oscar Darmawan, CEO Indodax, salah satu bursa kripto di Indonesia, kepada *Bisnis*, Senin (17/10).

Transaksi kripto di Indonesia belakangan lunglai, tecermin pada data Bappebti yang menunjukkan transaksi sepanjang Januari-Agustus hanya Rp249,3 triliun, anjlok 56,35% year on year, meskipun jumlah investor terus bertambah. (Lihat *infografik*)

Oscar mengatakan pematangan kelembagaan perdagangan aset kripto merupakan langkah baik yang berujung pada keamanan dan kenyamanan transaksi investor meskipun dari sisi penyelesaian transaksi dan penempatan dana menjadi kurang efisien. Selama ini, sebagaimana pula berlangsung di bursa kripto internasional, dana investor dikelola oleh bursa bersangkutan.

"Ini sudah plus-minus ya. Memang aturan di Indonesia agak berbeda. Hanya, saya kira aturan di Indonesia semangatnya untuk perlindungan kepada pelanggan," tutur Oscar.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan

Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya pekan lalu mengatakan bursa, lembaga kliring, dan kustodian aset kripto sedang dalam tahap pendaftaran dan penilaian perizinan.

Langkah itu, sambungnya, bertujuan untuk menjaga keamanan transaksi perdagangan, memastikan kesesuaiannya dengan peraturan, serta transparan.

Namun, Bappebti tidak dapat memastikan kapan lembaga-lembaga itu akan diluncurkan dengan alasan tidak ingin terburu-buru guna memastikan ekosistem yang terbentuk berjalan dengan baik dan sesuai fungsi.

"Seluruh lembaga yang dibentuk pada ekosistem perdagangan aset kripto memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan menerima laporan dari pedagang aset kripto," ujar Tirta, Jumat (14/10).

Lembaga kliring akan berfungsi menjamin transaksi aset kripto. Minimal 70% dana pelanggan disimpan di lembaga kliring dan 30% dapat disimpan di pedagang aset kripto.

Sementara itu, kustodian berfungsi sebagai tempat penyelesaian transaksi dan penyimpanan aset kripto dengan ketentuan minimal 50% aset kripto disimpan di lembaga pengelola dan 50% di pedagang aset kripto. Indonesia belakangan menunjukkan niat yang lebih serius untuk mengatur perdagangan aset kripto meskipun peluncuran bursa belum jelas hingga kini. Bulan lalu, Bappebti mengemukakan rencana mengajukan pimpinan bursa kripto domestiknya sebagian besar disisi oleh warga negara Indonesia guna memberi perlindungan lebih ketat pada konsumen.

Dilansir *Bloomberg*, Rabu (21/9), setidaknya dua pertiga direktur dan komisaris di bursa kripto tahun orang Indonesia yang tinggal di

negara ini.

"Dengan begitu, paling tidak kita bisa mencegah mereka kabur jika ada masalah," kata Pejabat Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dalam rapat dengan pendapat dengan DPR, Selasa (20/9).

Dia tidak mengatakan kapan revisi peraturan akan dikeluarkan. Sejumlah otoritas di Asia belakangan ini berjuang untuk membuat para pendiri kripto bekerja sama dalam penyelidikan kerutuban mata uang kripto. Sebagai contoh, Do Kwon, salah satu pendiri ekosistem Terraform Labs yang menjadi pusat kehancuran Terra senilai US\$60 miliar, telah meninggalkan Singapura saat jaks Korea Selatan mencari bantuan Interpol untuk menangkapnya.

CEO Tokocrypto Pang Xue Kai menyambut baik langkah Bappebti yang terus menguatkan ekosistem industri aset kripto di Tanah Air. Menurutnya, kehadiran tiga lembaga utama itu akan sangat menguntungkan konsumen atau nasabah.

"Adanya kliring ini sebenarnya untuk mempromosikan, melindungi, dan meningkatkan pelayanan serta kenyamanan kepada para investor yang akan bertransaksi aset kripto," ujarnya.

Lembaga kliring, jelasnya, bisa melakukan pengecekan atas transaksi aset kripto. Nantinya setiap dana investor yang hendak masuk ke *wallet exchange*, akan melalui proses verifikasi dan proses pengecekan ganda terlebih dahulu oleh lembaga kliring. Dengan begitu, dana investor akan aman karena ada penjamin penyelesaian transaksi.

Pemerintah pun dapat mengawasi transaksi jual beli dengan lebih transparan dan pasti.

kegagalan transaksi, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor bertransaksi di pasar," paparnya.

Dia berharap, dengan lembaga kliring, masyarakat bisa lebih percaya dan yakin memulai investasi aset kripto, sehingga pertumbuhan yang sedang berjalan ini bisa berkelanjutan.

Di samping itu, keberadaan lembaga kliring dapat menghapus stigma keamanan yang rentan dalam transaksi perdagangan aset kripto. Investasi bodong pun bisa ditekan dengan keberadaan lembaga penjamin ini.

BUKAN BARANG BARU

Menurut Pang, lembaga kliring sebenarnya bukan hal baru bagi Tokocrypto. Bursa itu telah menjalin kolaborasi dengan Indonesia Clearing House (ICH), lembaga kliring resmi untuk pelaporan dan pendaftaran aset kripto yang dipergunakan atau pun disimpan oleh pedagang aset kripto.

"Integrasi Tokocrypto dengan Lembaga Kliring ICH merupakan langkah konkret untuk membangun ekosistem perdagangan aset kripto yang lebih terkontrol dan terawasi dengan baik sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada investor untuk

bertransaksi di Indonesia," jelasnya.

ICH menjalankan fungsi sebagai penjaminan dan penyelesaian transaksi serta sentra manajemen risiko atas transaksi yang terjadi di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) sejak 2009.

Di Indonesia, aset kripto sendiri termasuk dalam kategori aset finansial komoditas dan Lembaga Kliring ICH sudah menjalankan operasional perdagangan komoditas dan telah mengantongi sertifikasi ISO 27001.

Perihal pengelolaan dana kripto, Tokocrypto masih mengelola dana transaksi aset kripto secara mandiri, baik simpanan maupun perdagangan di platform sendiri.

"Demikian menjaga keamanan dan akuntabilitas, kami terus melakukan audit secara berkala dengan mengundang kantor KAP [kantor akuntan publik] dan memberikan laporan rutin kepada Bappebti," tambahnya.

Sementara itu, General Counsel Pintu Dimas Utomo mengatakan masih memantau perkembangan pembentukan bursa hingga lembaga kliring. Bersama dengan calon pedagang aset fisik kripto (CPAFK) yang lain, Pintu berdiskusi dengan pemerintah untuk membantu merumuskan lembaga kliring yang tepat dan dibutuhkan bagi investor.

"Kami selalu memberikan dukungan penuh bagi pemerintah dalam upayanya memberikan kepastian dari sisi regulasi yang tentunya penting bagi keamanan investor kripto yang jumlahnya telah mencapai 16 juta orang," ujarnya.

Sebagai CFAK yang terdaftar di Bappebti, sambung Dimas, Pintu berusaha mematuhi batasan-batasan yang akan diberlakukan ketika lembaga kliring telah terbentuk. ☐